

ANALISIS PEMAHAMAN PELAKU UMKM PADA PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM

Oleh:
¹Zikri Aidilla Syarli, ²Saipul Al Sukri

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

e-mail: zikri.aidilla.syarli@uin-suska.ac.id¹, saipul@gmail.com²

ABSTRACK

This study aims to evaluate the level of understanding among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the preparation of financial statements based on the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM). The research employs a descriptive approach with a qualitative method. The population consists of MSME actors engaged in bread production in Mandau District, Bengkalis Regency. Data were collected through interviews and documentation involving eight business owners. The findings reveal that although MSME actors have conducted financial record-keeping, it remains basic and has not yet adhered to the principles of SAK EMKM. These results indicate a low level of understanding of applicable financial reporting standards. Therefore, the study highlights the importance of comprehensive education and assistance programs to enhance the quality and compliance of MSME financial reporting in accordance with SAK EMKM

Keywords: MSMEs, Understanding, Financial Reports, Indonesian Financial Accounting Standards (SAK EMKM)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang produksi roti di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap delapan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku UMKM telah melakukan pencatatan keuangan, pencatatan tersebut masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada prinsip-prinsip SAK EMKM. Temuan ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya program edukasi dan pendampingan intensif untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan pelaporan keuangan UMKM sesuai dengan SAK EMKM

Kata Kunci: UMKM, Pemahaman, Laporan Keuangan, SAK EMKM

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup perekonomian Indonesia terdapat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi penopang utama, berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sektor ini mencakup lebih dari 64 juta unit usaha, menyumbang sekitar 61% dari total PDB, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja produktif (Kemenkop UKM, 2022). Namun demikian, di balik kontribusi besarnya, mayoritas UMKM nasional masih menghadapi tantangan fundamental dalam aspek pengelolaan keuangan yang terstruktur, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Permasalahan mendasar yang sering dihadapi pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan meliputi beberapa aspek krusial. Pertama, masih banyak pelaku usaha yang mencampuradukkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kedua, sistem pencatatan yang digunakan cenderung sederhana dan tidak mengikuti kaidah akuntansi yang benar. Ketiga, minimnya pemahaman tentang pentingnya laporan keuangan sebagai alat pengendalian bisnis dan pemenuhan kewajiban regulasi (OJK, 2021). Kondisi ini menjadi paradoks mengingat laporan keuangan yang andal seharusnya menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan strategis bisnis.

Merespons tantangan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memperkenalkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai bentuk penyederhanaan dari standar akuntansi konvensional. SAK EMKM secara khusus dirancang dengan beberapa karakteristik utama: (1) penyederhanaan pengakuan dan pengukuran aset, (2) fleksibilitas dalam penyajian laporan keuangan, (3) pengurangan kompleksitas pengungkapan, dan (4) penyesuaian dengan karakteristik khusus UMKM (IAI, 2021). Standar ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban penyusunan laporan keuangan.

Namun demikian, implementasi SAK EMKM di lapangan masih menemui berbagai kendala substantif. Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap 30 pelaku UMKM di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% responden yang pernah mendengar tentang SAK EMKM, dan dari jumlah tersebut, kurang dari 20% yang memahami prinsip-prinsip dasarnya. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Darmawan, K., & Wahyuni (2021) yang melaporkan bahwa tingkat adopsi SAK EMKM di kalangan UMKM Bali masih berada di kisaran 25-30%.

Rendahnya pemahaman ini berimplikasi serius pada beberapa aspek. Pertama, dari sisi akses permodalan, laporan keuangan yang tidak standar menjadi hambatan utama dalam pengajuan kredit ke lembaga keuangan. Data Bank Indonesia (2022) menunjukkan bahwa hanya 15% UMKM yang mampu memenuhi persyaratan administrasi perbankan, dimana salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan laporan keuangan yang memadai. Kedua, dari aspek tata kelola usaha, ketiadaan laporan keuangan yang benar menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja dan perencanaan bisnis.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perkembangan ekosistem bisnis digital. Di era dimana transparansi keuangan menjadi prasyarat dalam membangun kemitraan bisnis, UMKM dengan sistem akuntansi yang lemah akan semakin tertinggal dalam persaingan. Survei terbaru oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa 70% mitra usaha digital mempersyaratkan laporan keuangan sederhana sebagai prasyarat kerjasama.

Observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan turun ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Bengkalis dan UMKM produksi roti yang berada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang akan menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Bersumber dari data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Bengkalis, terdapat 15 UMKM yang terdaftar melaksanakan bisnis terkait produksi roti pada tahun 2020. Jumlah UMKM tersebut semakin hari semakin berkurang dan bersisa sebanyak delapan UMKM yang melaksanakan produksi roti. Dampak Covid-19 menjadi faktor utama hal ini terjadi. UMKM tersebut tidak dapat bertahan bahkan berekspansi, dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya, terutama dari segi pembiayaan. Rumusan masalah yang dapat dikembangkan dari latar belakang tersebut, yang pertama bagaimana pemahaman pelaku UMKM pada pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM?

TINJAUAN TEORI

Teori Pemahaman

Teori pemahaman dalam konteks pembelajaran akuntansi merujuk pada konstruksi kognitif yang memungkinkan individu untuk menginternalisasi, menginterpretasi, dan menerapkan konsep-konsep akuntansi dalam praktik bisnis nyata (Bloom, 1956 dalam Anderson & Krathwohl, 2001). Menurut teori pemahaman kognitif yang dikembangkan oleh Anderson dan Krathwohl (2001), proses pemahaman terhadap materi akuntansi terdiri dari enam tahapan berjenjang: mengingat (remember), memahami (understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan mencipta (create).

Dalam konteks implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), tingkat pemahaman pelaku UMKM dapat diukur melalui beberapa indikator: (1) kemampuan menjelaskan konsep dasar akuntansi dengan bahasa sendiri (pemahaman konseptual), (2) penerapan prinsip-prinsip SAK EMKM dalam pencatatan transaksi (pemahaman prosedural), dan (3) analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan (pemahaman aplikatif) (IAI, 2021). Penelitian sebelumnya oleh Sari dan Santoso (2022) menekankan bahwa pemahaman komprehensif terhadap standar akuntansi memerlukan pendekatan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan karakteristik kognitif pelaku UMKM, yang umumnya lebih visual dan praktis.

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Weiner (1985) menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan penyebab dari keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menjalankan suatu tugas, termasuk dalam memahami konsep-konsep akuntansi. Teori ini mengelompokkan penyebab ke dalam tiga dimensi: locus of control (internal vs. eksternal), stability (stabil vs. tidak stabil), dan controllability (dapat dikendalikan vs. tidak dapat dikendalikan).

Dalam konteks pemahaman terhadap SAK EMKM, pelaku UMKM dapat mengaitkan kesulitan yang mereka alami dengan faktor internal seperti kurangnya pengetahuan akuntansi, atau faktor eksternal seperti kompleksitas standar maupun minimnya pelatihan. Penelitian oleh Darmawan dan Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa UMKM yang menganggap pemahaman akuntansi sebagai faktor yang dapat dikendalikan (controllable) cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, UMKM yang memandang SAK EMKM sebagai hambatan eksternal yang bersifat stabil, misalnya dengan menganggapnya terlalu rumit, cenderung mudah menyerah. Teori ini penting untuk menganalisis disparitas adopsi SAK EMKM di kalangan UMKM serta untuk merancang intervensi pelatihan yang efektif guna membangun keyakinan diri (self-efficacy).

Pemahaman Laporan Keuangan dalam Konteks UMKM

Pemahaman terhadap laporan keuangan merupakan kompetensi fundamental yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengevaluasi kinerja bisnis serta mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Dalam konteks UMKM, kompetensi ini menjadi semakin krusial mengingat keterbatasan sumber daya serta tingginya ketergantungan pada pengelolaan keuangan pribadi (Brigham & Houston, 2022).

Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 28,7% pelaku UMKM di Indonesia yang mampu menyusun laporan keuangan lengkap sesuai dengan standar akuntansi, sementara sisanya (71,3%) masih mengandalkan pencatatan keuangan sederhana (BPS, 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan akuntansi yang signifikan pada sektor mikro. Menurut teori literasi keuangan yang dikembangkan oleh Lusardi dan Mitchell (2014), pemahaman laporan keuangan yang memadai harus mencakup tiga aspek utama: (1) pengenalan elemen dasar laporan keuangan, (2) interpretasi rasio keuangan sederhana, dan (3) penerapan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis.

Implementasi SAK EMKM sebagai standar akuntansi yang disederhanakan sebenarnya dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan ini. Namun, temuan dari penelitian lapangan oleh Tim Peneliti Kemenkop UKM (2022) menunjukkan bahwa 63% responden menganggap SAK EMKM masih terlalu teknis untuk dipahami tanpa pendampingan profesional. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan pedagogis yang lebih kontekstual dan praktis dalam menyampaikan materi akuntansi kepada pelaku UMKM.

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah)

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM di Indonesia. Diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), SAK EMKM bertujuan menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh UMKM, tanpa mengorbankan kualitas informasi yang dihasilkan.

Adapun tujuan utama dari SAK EMKM antara lain: (1) memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, (2) meningkatkan transparansi keuangan sebagai syarat untuk mengakses pembiayaan (baik dari perbankan maupun investor), (3) memenuhi kewajiban perpajakan dan regulasi lainnya, serta (4) membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Menurut IAI (2021), indikator pemahaman akuntansi berdasarkan SAK EMKM meliputi: (1) pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi, (2) kemampuan menyusun laporan keuangan, (3) penerapan prinsip akuntansi secara tepat, (4) penggunaan laporan keuangan dalam praktik bisnis, dan (5) pemahaman terhadap kriteria standar SAK EMKM.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2013) metodologi penilaian emosional merupakan teknik eksplorasi yang bergantung pada perspektif postpositivis, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang lengkap, kompleks, dinamis, dan penuh dengan kepentingan yang dieksplorasi. Untuk mengeksplorasi keadaan item reguler, dimana analisis adalah instrumen kuncinya, metode pengumpulan informasi selesai ditempatkan, penyelidikan informasi bersifat induktif/subjektif, dan penyelidikan hasil menggarisbawahi makna daripada spekulasi. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kec. Mandau Kab. Bengkalis dikarenakan

adanya fenomena terkait pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang berada di Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Penelitian ini berfokus pada pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap akuntansi dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik Purposive sampling dengan kriteria UMKM yang bergerak dibidang usaha produksi roti. Kriteria ini digunakan dikarenakan fenomena yang digunakan sesuai dengan sampel yang ada.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dikembangkan melalui data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dan menggunakan teknik wawancara serta catatan atau dokumentasi yang memanfaatkan media elektronik pada Informan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM produksi roti di kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Wawancara dilakukan dengan menadatang tempat usaha UMKM produksi roti tersebut secara satu persatu. Hal ini dilakukan agar wawancara dapat maksimal dan hanya dijawab oleh orang yang memiliki usaha UMKM, sehingga data yang didapatkan terkait pemahaman dan pengetahuan sesuai dan dapat dimaksimalkan. Data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Peneliti mewawancarai delapan pemilik UMKM roti yang berada di kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis

Pemahaman pelaku UMKM pada pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM dikembangkan dari indikator yang terdapat didalam SAK EMKM, kemudian dikembangkan bebrapa pertanyaan yang merujuk kepada indikator tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang digunakan sebagai dasar pengembangan pembahasan ini. Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, diketahui bahwa:

1. Pemahaman konsep dasar dari akuntansi

Pemahaman konsep dasar dari akuntansi, dilihat dari adanya kemampuan menjelaskan 5 elemen laporan keuangan, yaitu: Aset, Liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pemahaman konsep dasar dari akuntansi dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa semua UMKM yang menjadi informan masih ditahap mengenal istilah-istilah tersebut, namun belum dapat mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi ke dalam lima elemen laporan keuangan tersebut. Pengetahuan akuntansi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia secara umum masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM belum memahami konsep dasar akuntansi dan belum menerapkan pencatatan keuangan secara memadai dalam pengelolaan usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pelatihan usaha, keterbatasan pengalaman manajerial, kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan kurangnya keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Sebagian besar pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, tanpa mengklasifikasikan ke dalam 5 elemen laporan keuangan tersebut dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Kemampuan penyusunan laporan keuangan

Kemampuan penyusunan laporan keuangan, dengan aspek yang muncul didalam laporan keuangan tersebut yaitu: neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan

(CALK). Kesimpulan yang didapatkan untuk indikator kedua ini yaitu semua UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak mengenal tentang neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM, dapat dideskripsikan bahwa dalam penyajian laporan keuangan, mayoritas pelaku UMKM masih menggunakan metode manual. Semua narasumber menyatakan bahwa pembukuan dan penyusunan laporan keuangan mereka dilakukan secara manual, biasanya dengan pencatatan menggunakan buku atau catatan sederhana.

Beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa pencatatan keuangan dilakukan dengan pendekatan yang sederhana, bahkan kadang-kadang hanya menggunakan perhitungan berdasarkan nalar tanpa bantuan alat atau software khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih mengandalkan metode tradisional dalam mengelola keuangan usaha mereka. Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam berbagai studi dan literatur yang menunjukkan bahwa banyak UMKM di Indonesia masih melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara manual karena keterbatasan pengetahuan akuntansi, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta biaya yang dianggap masih tinggi untuk menggunakan software akuntansi. Namun, meskipun masih manual, pencatatan yang dilakukan cukup untuk menggambarkan pendapatan yang diperoleh sepanjang tahun, sehingga tuntutan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui PP 55 tahun 2022 dapat terpenuhi.

3. Penerapan Prinsip Akuntansi

Penerapan Prinsip Akuntansi dalam hal ini dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama Pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Pelaku UMKM dalam praktiknya sering menghadapi tantangan terkait pengeluaran pribadi yang menggunakan modal usaha. Beberapa mengizinkan modal terpakai untuk pengeluaran pribadi jika laba berkurang, sementara yang lain berusaha memisahkan dan mengelola pengeluaran pribadi secara terpisah dengan menyisihkan dari laba. Penambahan modal dilakukan jika modal berkurang akibat pengeluaran pribadi. Pemisahan keuangan pribadi dan usaha sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis dan memudahkan pencatatan serta pengelolaan modal secara efektif. Beberapa pelaku UMKM mengakui bahwa apabila laba usaha berkurang, secara otomatis modal usaha akan terpakai untuk menutupi pengeluaran pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa uang modal dan keuangan pribadi masih tercampur, sehingga pengeluaran pribadi kadang diambil dari modal usaha. Ada narasumber yang menyatakan bahwa pengeluaran pribadi sebaiknya dipisahkan dari modal usaha. Mereka mengelola pengeluaran pribadi dengan menyisihkan uang harian dari hasil laba, karena modal usaha sudah dimasukkan secara terpisah dan tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Beberapa narasumber menjelaskan bahwa jika pengeluaran pribadi menggunakan dana usaha, maka modal usaha harus ditambah kembali agar modal tetap utuh. Dengan kata lain, pengeluaran pribadi yang menggunakan dana usaha dianggap sebagai pengurangan modal dan harus diimbangi dengan penambahan modal baru agar modal usaha tidak berkurang. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa masih kurangnya pemahaman UMKM mengenai pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Pencampuran antara keuangan pribadi dan usaha sering terjadi pada UMKM, terutama yang baru mulai usaha. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan, seperti kesulitan melacak arus kas, menghitung laba rugi, serta risiko keuangan pribadi yang tercampur dengan bisnis. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memisahkan rekening dan pencatatan keuangan pribadi dan bisnis agar lebih terstruktur dan memudahkan pengelolaan keuangan usaha.

Aspek yang kedua dilihat dari pengakuan pendapatan dan beban. Keseluruhan informan yang diwawancarai, dapat melakukan pengakuan atas pendapatan yang diperoleh.

Kendala yang terjadi pada pengakuan beban. Pelaku UMKM cenderung mengelola beban pengeluaran dengan cara mencatat dan menjumlahkan seluruh biaya yang muncul, meskipun ada perbedaan dalam cara mengontrol dan memperkirakan besarnya beban tersebut. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan biaya dalam menjaga kesehatan finansial usaha, meskipun masih terdapat tantangan dalam penentuan dan pengukuran beban secara tepat. Terdapat informan menyatakan bahwa beban pengeluaran dihitung dengan cara membatasi pengeluaran maksimal sekitar 30% dari total penjualan. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menjaga agar biaya operasional tidak melebihi proporsi tertentu agar usaha tetap menguntungkan. Namun, terdapat juga informan merasa kesulitan menentukan beban pengeluaran secara pasti karena adanya fluktuasi dan ketidakpastian dalam biaya yang harus dikeluarkan. Informasi informan lainnya juga menjelaskan bahwa beban pengeluaran dihitung dengan memasukkan semua jenis biaya yang terkait dengan operasional usaha, seperti biaya bahan baku, biaya operasional harian, cicilan kredit motor dan rumah, listrik, makan, serta gaji anggota atau pekerja. Mereka menekankan pentingnya mencatat secara lengkap semua beban, termasuk biaya tak terduga, untuk mendapatkan gambaran total pengeluaran yang akurat.

4. Penggunaan Laporan Keuangan

Penggunaan Laporan Keuangan dapat dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya PP 55 tahun 2022, yang memang mengatur mengenai Pajak Penghasilan untuk UMKM tersebut. Keseluruhan dari pelaku UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini sudah mengetahui tarif pajak yang tersedia dalam aturan tersebut. Namun, tidak keseluruhan dari informan yang melakukan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Masih ada informan yang belum mengetahui mengenai perubahan aturan PP 23 tahun 2018 menjadi PP 55 tahun 2022, dimana perubahan yang terjadi pada batas minimum peredaran bruto usaha menjadi Rp 500 juta. Sehingga UMKM yang memperoleh peredaran bruto usaha dibawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak.

Aspek yang kedua yaitu analisis kesehatan bisnis. Penelitian ini dikembangkan, karena banyaknya UMKM produksi roti yang tutup setelah pasca Covid-19. Salah satu penyebab hal ini terjadi, karena kurang mampunya UMKM menganalisa kesehatan bisnis mereka. Informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini bahkan belum mampu menentukan apakah mereka mengalami keuntungan atau malah mengalami kerugian.

5. Pemahaman Kriteria SAK EMKM

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) dirancang khusus untuk UMKM dengan batasan tertentu agar sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Kriteria utama penerapannya meliputi dua indikator: (1) total aset tidak melebihi Rp50 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan), atau (2) omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 miliar. Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang disederhanakan ini hanya berlaku bagi usaha yang benar-benar membutuhkan pendekatan praktis dalam penyusunan laporan keuangan, tanpa terbebani oleh kompleksitas standar akuntansi yang lebih tinggi seperti SAK ETAP atau SAK Lengkap.

Penting bagi pelaku UMKM untuk memahami bahwa jika usaha mereka berkembang dan melampaui salah satu dari batas tersebut, mereka harus beralih ke standar akuntansi yang lebih komprehensif. Misalnya, jika sebuah usaha roti yang awalnya beromzet Rp250 miliar per tahun kemudian berkembang menjadi Rp350 miliar, maka laporan keuangannya harus disesuaikan dengan SAK ETAP. Pemahaman ini tidak hanya membantu UMKM memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk transisi yang

lancar ketika bisnis semakin berkembang. Dengan demikian, SAK EMKM berfungsi sebagai jembatan bagi UMKM menuju tata kelola keuangan yang lebih matang dan profesional.

Pada penelitian ini, semua UMKM yang menjadi sampel memenuhi kriteria ini. UMKM yang menjadi sampel diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, namun kenyataannya tidak ada UMKM yang membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Kurangnya edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM, sehingga tidak dapat menyediakan laporan keuangan yang sesuai. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi serius pada beberapa aspek. Pertama, dari sisi akses permodalan, laporan keuangan yang tidak standar menjadi hambatan utama dalam pengajuan kredit ke lembaga keuangan. Data Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa hanya 15% UMKM yang mampu memenuhi persyaratan administrasi perbankan, dimana salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan laporan keuangan yang memadai. Kedua, dari aspek tata kelola usaha, ketiadaan laporan keuangan yang benar menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja dan perencanaan bisnis.

PENUTUP

Kesimpulan

Keterbatasan pemahaman terhadap pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah diteliti khususnya di Indonesia masih sangat terbatas dan cenderung tidak memahami. Mereka umumnya menganggap akuntansi sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara manual. Pencatatan dilakukan secara sederhana menggunakan buku catatan atau nota harian tanpa menyusun laporan keuangan secara formal. Konsep dasar akuntansi, seperti penyusunan neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang distandarkan di dalam SAK ETAP, masih belum dipahami secara menyeluruh oleh sebagian besar pelaku UMKM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya latar belakang pendidikan keuangan, minimnya akses pelatihan, keterbatasan pengetahuan teknologi, serta kurangnya dukungan sumber daya. Meskipun begitu, para pelaku UMKM sudah menunjukkan kesadaran pentingnya pencatatan keuangan. Mereka menunjukkan niat baik dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan, namun masih membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa pelatihan, penyuluhan, dan panduan praktis yang lebih terstruktur agar mereka dapat menjalankan usaha secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning.
- Darmawan, K., & Wahyuni, N. M. S. (2021). Persepsi Pelaku UMKM terhadap Manfaat SAK EMKM: Studi di Wilayah Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 33–47.
- IAI. (2021). *SAK EMKM*.

- Indonesia, B. (2022). *Pemetaan Implementasi SAK EMKM*.
- Kemenkop UKM. (2022). *Laporan Kinerja UMKM*.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- OJK. (2021). *Survei Literasi Keuangan UMKM*.
- Sari, D., & Santoso, B. (2022). Analisis Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 45–60.
- Statistik, B. P. (2023). *Survei Literasi Keuangan Pelaku UMKM Nasional*. BPS.
- Sugiono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548–573.